**PELAKSANAAN PROGRAM PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI PROVINSI BALI CABANG KOTA DENPASAR**

|  |
| --- |
| Oleh :  Dewa Gede Udayana Maharendra  I Ketut Sudiarta  Gusti Ayu Dyah Satyawati |
| Bagian Hukum Administrasi Negara, Universitas Udayana |

**ABSTRAK**

Penulisan ini berjudul “Pelaksanaan Program Penyelenggara Jaminan Kesehatan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Provinsi Bali Cabang Kota Denpasar”. Sehingga pentingnya mengetahui bagaimanakah pelaksanaan tugas BPJS dalam hal pemberian informasi kepada publik terkait penyelenggara program jaminan kesehatan di Provinsi Bali Cabang Kota Denpasar serta apakah kendala – kendala dalam penerapan informasi publik oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan di Provinsi Bali Cabang Kota Denpasar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang berupa keterangan-keterangan atau wawancara dari pihak-pihak terkait dalam penelitian ini sedangkan data sekunder berasal dari penelitian pustaka melalui peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku dan dokumen-dokumen resmi. Dari hasil kajian dapat disimpulkan bahwa pertama BPJS Kesehatan cabang Kota Denpasar dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua dalam pelaksanaannya masih ada kendala yakni, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memerhatikan atau menyerap informasi yang diberikan oleh BPJS.

**Kata kunci** : Pelaksanaan, Informasi publik, BPJS Kesehatan

***ABSTRACT***

*The jurnal entitled is "Implementation of the Health Insurers program by the Social Security Agency (BPJS) of Health Branch of the Province of Bali Denpasar City". So its importance of knowing how to exercise duties BPJS in terms of providing information to the public related to the organizers of the health insurance program at the Bali Provincial Branch of Denpasar and whether obstacles - obstacles in the implementation of public information by the Social Security Agency (BPJS) Health in the administration of health insurance scheme in the province of Bali branch Denpasar. Method of empirical legal research. The source of the data in this study are primary data obtained directly from field research in the form of information, or interviews of stakeholders in the research and secondary data derived from the research literature through legislation, literature, books and official documents. From the results of the study it can be concluded that the first BPJS Denpasar branch in its implementation is in conformity with the legislation in force, both in practice there are still obstacles namely, the lack of public awareness in attention or absorb the information provided by BPJS.*

***Keywords*** *: Implementation, Public Information, for Health*

|  |
| --- |
| **I. Pendahuluan**   1. **Latar Belakang** |

Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap warga Negara Indonesia dan oleh karena itu pemerintah mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan kesehatan yang dapat diakses diseluruh warga Negara. Pemanfaatan pelayanan kesehatan paling erat hubungannya dengan kapan orang memerlukan pelayanan kesehatan dan seberapa jauh seorang menempuh pelayanan kesehatan.[[1]](#footnote-1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya di singkat BPJS kesehatan adalah badan hukum yang di bentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (BPJS) kesehatan memiliki banyak kelemahan dalam tataran pelaksanaannya. Ketentuan pasal 4 Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang BPJS, bahwa BPJS kesehatan mempunyai pelayanan kesehatan dan perlindungan kesehatan yang sangat ideal, memiliki asas manfaat, keadilan sosial dan kemanusiaan, dan adanya prinsip gotong royong dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa kelemahan yang di sebutkan Metro Bali tahun 2015, pada pelaksanaan program BPJS kesehatan di Bali, yaitu kurang sosialisasi tentang hak dan kewajiban peserta BPJS kesehatan, tempat pendaftaran terbatas, fasilitas kesehatan dan SDM yang ada di Provinsi Bali tidak sebanding dengan peserta BPJS, penduduk yang belum mempunyai KTP tidak bisa dilayani dan lainnya.[[2]](#footnote-2)

|  |
| --- |
| 1. **Tujuan** |

Tujuan penelitian jurnal ini adalah untuk mengetahui pertama, bagaimanakah pelaksanaan tugas BPJS dalam hal pemberian informasi kepada publik terkait penyelenggaraan program jaminan kesehatan di Provinsi Bali cabang kota Denpasar dan yang kedua, apakah kendala – kendala dalam penerapan informasi publik oleh Badan penyelenggara Jamian Sosial (BPJS) Kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan di Provinsi Bali cabang kota Denpasar.

|  |
| --- |
| **II. ISI MAKALAH**   1. **Metode Penelitian** |

Menurut Soerjono Soekanto metode penelitian diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.[[3]](#footnote-3) Jenis penelitian dipergunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian empiris. pendekatan yang digunakan adalah pendekatan langsung ke kantor BPJS Kesehatan cabang Kota Denpasar kemudian dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan dan pendekatan fakta melihat keadaan nyata diwilayah penelitian, agar memperoleh kebenaran materiil guna penyempurnaan jurnal ini.

1. **Hasil Dan Pembahasan**

|  |  |
| --- | --- |
| **2.1.1** | **Penerapan Dan Pelaksanaan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Kepada Masyarakat Bali** |

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi lingkungan sosialnya, informasi adalah data yang diolah dan dibentuk yang lebih berguna bagi yang penerimannya.[[4]](#footnote-4) Keterbukaan informasi salah satu sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dan badan publik lainnya, BPJS Kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial dalam hal pelayanan kesehatan maupun informasi publik. pelaksanaan tugas BPJS dalam pemberian informasi kepada masyarakat meliputi : a) informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berskala, b) informasi yang tersedia setiap saat dan c) informasi yang diumumkan serta merta. bentuk-bentuk penyampaiannya semua media informasi apapun sudah digunakan yaitu media konvensional seperti sosialisasi ke banjar-banjar, radio, koran, banner dan media sosial. informasi publik yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan cabang Kota Denpasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat pada pasal 9, pasal 10 dan pasal 11.

|  |  |
| --- | --- |
| **2.2.2.** | **Kendala Dalam Penerapan Informasi Publik Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Di Provinsi Bali Cabang Kota Denpasar** |

Dalam memberikan informasi kepada publik kepada masyarakat BPJS Kesehatan mempunyai beberapa kendala dalam penerapannya yang terletak terutama kesadaran pada masyarakatnya yang kurang menyerap atau menerima informasi yang diberikan oleh BPJS Kesehatan, seperti informasi yang wajib disediakan, informasi yang disediakan dan diumumkan serta informasi serta merta, karena dalam faktanya BPJS Kesehatan sudah menginformasikan semua dalam bentuk apapun yang memungkinkan BPJS Kesehatan gunakan seperti media konvensional, media online dan lain sebagainya.

|  |
| --- |
| **III.** **KESIMPULAN** |

Berdasarkan serangkaian pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Pelaksanaan tugas BPJS dalam hal pemberian informasi kepada publik terkait penyelenggara program jaminan kesehatan di Provinsi Bali Cabang Kota Denpasar meliputi : a) informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berskala, b) informasi yang tersedia setiap saat dan c) informasi yang diumumkan serta merta. informasi publik yang disampaikan oleh masyarakat sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. adapun kendalanya terletak pada kurangnya kesadaran pada masyarakatnya yang kurang menyerap atau menerima informasi yang diberikan oleh BPJS Kesehatan, seperti informasi yang wajib disediakan, informasi yang disediakan dan diumumkan serta informasi serta merta, karena dalam faktanya BPJS Kesehatan sudah menginformasikan semua dalam bentuk apapun yang memungkinkan BPJS Kesehatan gunakan seperti media konvensional, media online dan lain sebagainya.

**DAFTAR PUSTAKA**

|  |
| --- |
| **BUKU :** |
| Azwar Azrul, 1996, *Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan*, Sinar Harapan, Jakarta. |
| Soerjono Soekanto,1999, *Ringkasan Metodelogi Penelitian Hukum Empiris*, Cet Ke 1, Ind-Hill-Co. |
| Jogiyanto Hartono, 2004, *Analisis Dan Desain Sistem Informasi* , Andi Offset, Yogyakarta. |
| **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :** |
| Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61) |
| Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) |
| **INTERNET :** |
| Metro Bali, 2015, Serial Online April, URL : <http://metrobali.com/2015/04/04/ini-12-kelemahan-bpjs-di-bali/>. Di Akses Tanggal 4 April 2015 |

1. Azwar, Azrul, 1996, *Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan*, Sinar Harapan, Jakarta, H. 5 [↑](#footnote-ref-1)
2. Metro Bali, 2015, Serial Online April, URL : <http://metrobali.com/2015/04/04/ini-12-kelemahan-bpjs-di-bali/>. Di Akses Tanggal 4 April 2015 [↑](#footnote-ref-2)
3. Soerjono Soekanto,1999, *Ringkasan Metodelogi Penelitian Hukum Empiris*, Cet Ke 1, Ind-Hill-Co, h. 6 [↑](#footnote-ref-3)
4. Jogiyanto Hartono, 2004, *Analisis Dan Desain Sistem Informasi* , Andi Offset, Yogyakarta, h. 5 [↑](#footnote-ref-4)